

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI DI KUTAI KARTANEGARA

Samsyul

**eJournal Konsentrasi Sosiologi
Volume 1, Nomor 3, 2013**

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Samsyul¹

Abstrak

Istilah korupsi bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Korupsi adalah suatu perilaku yang menginginkan keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompok dengan cara melanggar hukum. Korupsi lahir karena abmruknya nilai-nilai social, korupsi kambuh karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Korupsi hidup dan berkembang karena sikap dan mental dari individu yang bobrok. Perilaku korupsi sudah menyebar luas karena pada hakekatnya kebutuhan dan keinginan manusia relatif tidak ada batasnya. Faktor psikologis, pengetahuan agama, dan pendidikan budi pekerti sangat berpengaruh terhadap motif seseorang dalam melakukan praktek korupsi.

Kiranya setiap orang menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak baik. Hal ini karena korupsi sangat merugikan negara dan rakyat kecil, sehingga dapat menghambat pembangunan infrasrtuktur dan dapat memberikan contoh yang buruk kepada orang lain dan generasi berikutnya. Meskipun menyadari beratnya ancaman hukuman dan masih perlu dipertimbangkan tercemarnya nama baik keluarga, tindakan korupsi masih saja ada.

Mungkin setiap pelaku korupsi mengalami berbagai dorongan atau tekanan (pressure) yang menjadi penyebab ia berperilaku korup. Dorongan yang paling kuat adalah yang berkitan dengan nafsu/keinginan memiliki sesuatu yang berlebihan, sehingga orang yang memiliki kekayaan pun juga berperilaku korup.

Kata Kunci: *Persepsi, Masyarakat, Korupsi, Kabupaten Kutai Kartanegara.*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiologi Konsentrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: samsyul15_@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang pada umumnya dihadapkan dengan berbagai masalah sosial. Salah satu masalah yang cenderung terjadi pada negara yang sedang berkembang adalah korupsi. Korupsi dapat menimbulkan kerugian di berbagai bidang. Tidak hanya di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, akan tetapi di negara- majupun korupsi menjelma menjadi virus yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik, pemerintah, swasta dan pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangan akan tetapi juga perorangan seperti calo tiket pesawat, kapal air, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadailan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Samarinda, daerah yang banyak terdapat kasus korupsi adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara di bandingkan dengan Kota/Kabupaen lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu perlu mengadakan perturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada pelaksana/penegak hukum bertindak terhadap pelaku-pelaku tersebut. Hal ini dilakukan karena di dalam prakteknya, peraturan yang telah di ada itu kurang efektif, sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan lainnya, yaitu peraturan penilikan harta benda.

Selanjutnya, korupsi juga sering dianggap sebagai penyakit sosial, mengingat dampak yang korupsi ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebagai penyakit sosial, permasalahannya sejajar dengan penyakit sosial lainnya, seperti perjudian, prostitusi, narkoba, dan kriminalitas. Kiranya setiap orang menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak baik. Hal ini karena korupsi sangat merugikan negara dan rakyat kecil, sehingga dapat menghambat pembangunan infrasrtuktur dan dapat memberikan contoh yang buruk kepada orang lain dan generasi berikutnya. Meskipun menyadari beratnya ancaman hukuman dan masih perlu dipertimbangkan tercemarnya nama baik keluarga, tindakan korupsi masih saja ada.

Menurut Mochhtar (2006:3) korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi. Kenyataannya membuktikan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meingkat pula kebutuhan hidup dan mendorong oran guntuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi

Menurut kamus bahasa Indonesia tahun 1982 persepsi adalah pandangan, pendapat, sambutan atau reaksi. Persepsi merupakan ungkapan yang disampaikan dengan lisan atau tulisan. Persepsi diberikan atas dasar pengetahuan atau pengalaman yang telah diperoleh, sehingga persepsi merupakan bentuk pernyataan dari hasil serapan atau apa saja yang diterima oleh panca indera. Selanjutnya Rakhmat (2000:51) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hal-hal yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Masyarakat dan ciri-cirinya

Menurut Shadily (1993:47) “masyarakat” adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan menurut Suparto (1987:109) masyarakat terdiri atas kelompok besar manusia yang relatif permanen, berinteraksi juga permanen, menganut dan menjunjung suatu nilai dan kebudayaan tertentu. Demikian pula halnya dengan masyarakat Kutai.

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki ciri-ciri tertentu. Hal ini menyebabkan mereka mudah untuk dikenali. Menurut Hendropuspito (1989:75) ciri-ciri dari masyarakat ada lima, yaitu : 1) memiliki wilayah dan batas yang jelas, 2) merupakan satu kesatuan pendudukan, 3) terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen, 4) mengemban fungsi umum.

Masyarakat Kutai

Menurut tradisi lisan dari Suku Kutai, masyarakat Kutai yang saat ini tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dahulunya adalah proses perpindahan penduduk dari daratan Asia yang kini disebut provinsi Yunan-Cina Selatan berlangsung antara tahun 3000-1500 Sebelum Masehi. Mereka terdiri dari kelompok yang mengembara hingga sampai di pulau Kalimantan dengan rute perjalanan melewati Hainan, Taiwan, Filipina kemudian menyeberangi laut Cina Selatan menuju Kalimantan Timur. Para imigran dari daratan Cina ini masuk ke Kalimantan Timur dalam waktu yang berbeda, kelompok pertama datang sekitar tahun 3000-1500 Sebelum Masehi termasuk dalam kelompok ras Negrid dan Weddid kelompok ini diperkirakan meninggalkan Kalimantan dan sebagiannya punah. Kemudian sekitar tahun 500 sebelum masehi berlangsung lagi arus perpindahan penduduk yang lebih besar dan kelompok inilah yang diperkirakan menjadi cikal bakal penduduk Kutai. Orang Kutai, atau disebut juga Suku Kutai, atau suku Dayak Kutai, saat ini tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara yang mayoritas beragama Islam dan bermukim di tepi sungai dan sejak kedatangan itu tadi mereka dipandang sebagai penduduk asli Kalimantan Timur.

Pada awalnya Kutai merupakan nama suatu teritori tempat bermukimnya masyarakat Kalimantan atau Dayak. Suku Kutai berdasarkan jenisnya adalah termasuk suku Melayu tua sebagaimana Suku Dayak di Kalimantan Timur. Oleh karena itu secara fisik suku Kutai mirip dengan suku Dayak rumpun Ot Danum. Jadi, pada awalnya Kutai bukanlah merupakan nama suatu suku, akan tetapi nama tempat/wilayah dan nama kerajaan tempat ditemukannya prasasti Yupa oleh penelitidari Belanda. Prasasti adalah pengharaan, sedangkan Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan raja Mulawarwan. Kemudian lambat laun Kutai menjadi nama suku.

Konsep Korupsi

Menurut Soekanto (1981:80) korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala: salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi; salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekautan senjata) untuk memperkaya diri.

Jenis-jenis Korupsi

Menurut Piers Beirne and James Messerschmidt (dalam Djaja, 2010:17) menyatakan bahwa ada empat jenis atau tipe perbuatan korupsi yang sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, yaitu:

1) Political bribery

Political bribery adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dan yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana.

2) Political kickback

Political kickback adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerja borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan perusahaan, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapat banyak uang bagi kedua belah pihak.

3) Election fraud

Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan ke dalam pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.

4) Corrupt campaign practice

Corrupt campaign practice adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan mengumpulkan data dengan latar belakang alamiah dan menggunakan metode ilmiah. Bodgan dan Taylor di dalam Moleong (2009:4) menegemukakan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan pada bab I yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggapan masyarakat Kutai terhadap praktek-praktek korupsi yang selama ini terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Konsepsi masyarakat Kutai tentang korupsi.
- 3) Pendapat masyarakat Kutai tentang faktor-faktor penyebab korupsi.
- 4) Pendapat masyarakat Kutai tentang cara-cara mencegah korupsi.

Di dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan/responden (yakni orang Kutai yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain kepala suku, anggota masyarakat biasa dan orang Kutai yang menjabat di pemerintahan). Di dalam menetapkan informan digunakan teknik *snowball sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang dimulai dari memilih seseorang sebagai informan kunci. Selanjutnya berdasarkan petunjuk dari informan kunci ini dipilih informan-informan yang lain. Teknik ini dilakukan sampai diperoleh data dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Sedangkan data sekunder, antara lain berupa hasil penelitian atau laporan penelitian dan dokumen-dokumen dari Kantor Bupati Kutai Kartanegara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan mengumpulkan data sekunder. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan melalui proses tanya jawab untuk melengkapi data primer.

Selanjutnya di dalam mengalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif-Kualitatif, yaitu metode analisis data yang menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992:16), bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui empat tahap, yakni: pengumpulan data, penyajian data (*display data*), penyederhanaan data (*reduksi data*), penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil Penelitian

Konsep Masyarakatakat Tentang Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui proses wawancara terhadap delapan orang informan mengenai konsep korupsi selama di lapangan, maka dapat dijelaskan bahwa setiap informan pada umumnya memberikan pendapat mereka menurut pengetahuan dan pengalamannya terhadap istilah korupsi yang mereka ketahui dari media elektronik. Pada umumnya setiap informan berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak jujur dan berkeinginan untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Bapak Rw(33tahun) korupsi adalah *"perbuatan yang berkeinginan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melanggar aturan-aturan atau norma-norma kehidupan yang ada. Perikau korupsi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan curang atau tidak jujur. Menurut pendapat saya, korupsi biasanya perbuatan yang sering memolorkan waktu dan biasanya berupa finansial"*. (sumber: hasil wawancara, 13 Mei 2013).

Istilah korupsi bukan lah ssuatu yang asing lagi bagi kita. Hal ini di tunjukkan dengan banyaknya berbagai fakta kasus korupsi yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Pelakunya bukan hanya dari kalangan orang-orang tetentu saja,namun dari berbagai kalangan. Pada dasarnya korupsi adalah perbuatan yang menginginkan kekuasaan, harta, jabatan dengan cara menipu, memanipulasi, dan memberikan hadiah untuk tujuan tertentu. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Ma (36 tahun) bahwa *"kourpsi adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian, membohongi publik, dan mengambil hak orang lain serta segala cara yang dilakukan oleh seseorang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi,kolusi, dan menipu orang lain. Biasanya korupsi berupa suap, sogok, pungutan liar (pungli), memberi hadiah dengan tujuan tertentu, meberi uang pelicin dan mar'ap"*. (sumber: hasil wawancara, 09 Mei 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, mementingkan diri sendiri, menghambat pembanguana dan di dalam hal pelayanan publik (birokrasi) masyarakat sangat sering menjumpai perikau yang korup dan sangat berbelit-belit.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktek Korupsi

Manusia terkadang mencari cara yang cepat untuk mencapai tujuannya, yaitu memiliki kekayaan yang banyak sehingga perbuatan yang bertentangan dengan agama dan hukum sekali pun ia lakukan demi memuaskan hawa nafsunya. Jadi, tidak heran jika manusia berbuat hal-hal yang melanggar hukum. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mj (72 tahun). Ketika ditanya tentang tanggapannya terhadap praktek korupsi: *"wajar-wajar saja karena*

sebagai manusia biasa mereka mungkin belum memiliki keimanan yang kuat atau pengetahuan agama yang cukup sehingga mudah tergoda oleh bujuk rayuan setan. Akan tetapi meski pun ia memiliki kekuatan pribadi, biasanya setan beralih strategi kepada keluarga/isteri yang mendorongnya sehingga ia pun terpengaruh dan akhirnya dia berbuat korupsi". (sumber: hasil wawancara, 05 Mei 2013).

Pelaku yang terlibat kasus korupsi sudah seharusnya ditindak sesuai dengan tingkat korupsinya. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak Hm (51 tahun) bahwa *"pelaku korupsi harus ditindak karena sangat merugikan. Setidaknya pelaku diberikan sanksi sesuai dengan tingkat korupsi yang ia lakukan contohnya dengan cara memindahkan jabatan, pangkatnya ditahan dan apabila korupsinya cukup berat maka langsung dibawa ke meja hijau (pengadilan)". (sumber: hasil wawancara, 09 Mei 2013).*

Selanjutnya apabila diperlukan pelaku korupsi harus dikenakan sanksi seberat-beratnya agar orang lain tidak meniru perbuatan yang tercela tersebut. Di dalam hal ini Bapak Mf (30 tahun) menyatakan bahwa *"apabila ada yang berbuat korupsi langsung dikum mati saja seperti di Cina. Hal itu dilakukan agar praktek korupsi tidak terulangi kembali". (sumber: hasil wawancara, 08 Mei 2013).*

Penilaian Masyarakat Terhadap Praktek Korupsi

Fakta telah membuktikan kepada masyarakat bahwa korupsi sudah snagt menjadi-jadi di negara kita. Bahkan ada yang beranggapan bahwa korupsi sudah menjadi seni dan bagian di dalam kehidupan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat negatif yang ditimbulkan karena adanya perilaku korupsi.

Masing-masing informan telah memberikan penilaiannya terhadap praktek korupsi. Berdasarkan hasil wawancara, informan pada umumnya menyatakan bahwa korupsi dapat menghambat pembangunan sarana/infrastruktur, dapat merusak kehidupan, pembanguna menjadi tidak merata disetiap daerah, dan pembangunan sarana-prasarana/infrastruktur menjadi seadanya atau tidak berkualitas serta dapat menghambat kesejahteraan masyarakat.

Para informan sepakat bahwa korupsi yang terjadi pada zaman dahulu (orde baru) dengan zaman sekarang perbandingannya sangat memperhatikan sekali. Hal ini karena pada zaman sekarang berbagai fakta telah membuktikan bahwa praktek korupsi hampir ada disetiap instansi pemerintahan maupun swasta dan pelakunya juga dari berbagai kalangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar informan setidak-tidaknya mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah korupsi. Pengetahuan mereka cukup bervariasi, namun kebanyakan dari informan menyatakan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan demi meruk keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya atau dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji karena mengambil hak orang lain.
- 2) Di dalam memberikan tanggapannya, masyarakat Kutai menyatakan bahwa perilaku korupsi sangat merugikan masyarakat dan negara karena perbuatan tersebut melanggar hukum agama dan hukum pidana. Masyarakat Kutai sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat maupun daerah benar-benar berkomitmmen dalam rangka usaha untuk memberantas korupsi. Di dalam hal ini masyarakat juga menilai bahwa perilaku korupsi dapat menghambat pembangunan di pusat dan di daerah , melemahkan perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya korupsi dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat.
- 3) Masyarakat Kutai berpendapat bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi adalah karena kurangnya pengetahuan agama, sifat serakah, mengikuti hawa nafsu, sanksinya ringan, pelaksanaan hukum yang tidak tegas, dan hukum yang bisa di jual-beli.
- 4) Menurut pendapat masyarakat Kutai (informan), cara yang tepat untuk mencegah terjadinya korupsi yakni melakukan pengawasan secara ketat, berkomitmen untuk menindas tegas jika ada yang berbuat korupsi tanpa memilah siapa yang berbuat korupsi, dan memberikan nasehat berupa pengetahuan agama dan akhlak yang baik.

Saran-saran

- 1) Memberikan pengajaran dan pengetahuan tentang korupsi.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pejabat yang menjabat agar dapat diketahui asal-usul yang dimilikinya.
- 3) Melakukan pengawasan yang ekstra ketat kepada instansi-instansi pemerintah dan swasta dalam rangka usaha untuk mencegah terjadinya praktek korupsi.
- 4) Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja yang berbuat korupsi supaya benar-benar dapat membuat pelaku menjadi jera sehingga orang lain tidak berani untuk melakukan hal yang serupa.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Alatas, syed Hussen, 1975. *Sosiologi Korupsi*. Delta Orient (Pte) Ltd. Singapore.
- Djaja, Ermansjah, 2010a. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikas Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 012-016/PPU-IV/2006*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010b. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fauziah, Siti, 2011. *Persepsi Pelajar Tentang Pornografi*. Skripsi. Samarinda.
- Hamzah, Andi, 1986. *korupsi Indonesia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Hendropuspito, D, 1989. *Sosiologi Sistemika*. Kanisius. Yogyakarta.
- Klitgraat, Robert, dkk, 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Laurens, Joyce Marcella, 2004. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Matthew B. Milles, Haburmen A. Michael, 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mochtar, M. Akil, 2006. *Memberantas Korupsi*. Q-Communication. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rakhmat, J, 2000. *Psikologi Komunikasi, edisi revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Shadily, Hasan, 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Seokanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Seokanto, Soerjono, 1981. *Patalogi Sosial Jilid 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soewartojo, Junaidi, 1997. *Korupsi*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Suradi, 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Gavva Media. Yogyakarta.
- Suparto, 1987. *Sosiologi dan Antropologi SMA Jilid 1*. CV. Armico. Bandung.
- Walgito, Bimo, 1980. *Pengantar Sosiologi Umum*. CV. Andi Offest. Yogyakarta.
- Walgito, Bimo, 2005. *Pengantar Sosiologi Umum*. CV. Andi Offest. Yogyakarta.
- Walgito, Bimo, 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. CV. Andi Offest. Yogyakarta.

Sumber Internet:

- Sidak, 2009. Sentra Informasi dan Data Untuk Anti Korupsi (SIDAK) Informasi Korupsi. Com. [www. Geo-korupsi. Php_files](http://www.Geo-korupsi.Php_files). (diakses 12 Desember 2012).
- Suku Kutai, Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas.htm. (diakses 01 Februari 2013).